

**STUDI KOMPIRASI PELAJARAN PKN DENGAN PELAJARAN PMP  
TERHADAP NILAI KEBINEKAAN DI MADRASAH TSANAWIYAH  
MUHAMMADIYAH AIMAS KABUPATEN SORONG**

Ihsan

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

[ihsanahmad@stkipmuhsorong.com.id](mailto:ihsanahmad@stkipmuhsorong.com.id).

Ayuk Hidayah

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

[yayuk.hidayah@pgsd.uad.ac.id](mailto:yayuk.hidayah@pgsd.uad.ac.id).

**ABSTRAK**

Pengaruh pendidikan kewarganegaraan pada negara-negara yang menganut paham demokrasi konstitusional. Banyak guru-guru lebih cenderung terhadap mata pelajaran PMP karena beranggapan bahwa penanaman nilai-nilai moral di anggap berhasil di bandingkan dengan PKN karena PMP terdapat komponen-komponen yang saling berinterelasi, pengajaran konsep-konsep inti secara sistematis, analisis terhadap studi kasus, keterampilan-keterampilan pembuatan keputusan, analisis komparatif, keterampilan partisipatoris dan kebajikan warga negara melalui kegiatan-kegiatan belajar, penggunaan buku sumber, pengetahuan, keterampilan dan kebajikan-kebajikan warga negara, dan menghubungkan antara isi dan proses dalam belajar mengajar pengetahuan, keterampilan dan kebajikan-kebajikan warga Negara. Hasil upaya mewujudkan warga negara Indonesia yang baik sebagaimana diharapkan dalam UUD 1945, tidak dapat dilepaskan dari konstelasi perkembangan zaman. Berdasarkan hal tersebut, penelitian menemukan data dan mengetahui terkait dengan studi kompirasi pelajaran PKN dan Pelajaran PMP terhadap nilai Kebinekaan. Pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan menurunnya moralitas remaja, semakin tingginya individualisme anak, serta lebih mementingkan kelompok pergaulan yang kontra dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat di bandingkan dengan Pelajaran PMP.

Kata Kunci: Hubungan, PKN dan PMP

## PENDAHULUAN

Pada abad ke-21 ini, warga negara suatu bangsa dihadapkan pada berbagai perubahan dan ketidakpastian seiring dengan perkembangan konstelasi kehidupan dalam berbagai aspek, baik aspek pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, politik, dan sebagainya. Negara Indonesia, pasca runtuhnya kekuasaan Orde Baru tahun 1998, mendorong turut melakukan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perubahan mendasar menurut Azis Wahab (2006:61) adalah suatu kehidupan yang lebih bebas, lebih demokratis, yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum dan keadilan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang berbudaya dan berakhlak mulia.

Tuntutan perubahan mendasar di atas lanjut Wahab (2006:61) mesti direspon oleh berbagai elemen dalam masyarakat, termasuk elemen fundamental, yaitu pendidikan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan manusia-manusia, warga negara/warga masyarakat yang memiliki ciri-ciri seperti dikemukakan di atas.

Pendidikan sebagai elemen dalam proses perubahan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara, sebagaimana ditegaskan dalam rumusan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa “berkembangnya potensi peserta didik agar bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis, merupakan (*mission sacre*) dari pendidikan kewarganegaraan (Winataputra, 2006). Lebih lanjut Winataputra (2006) berpendapat bahwa secara konseptual ilmiah, semua imperatif atau keharusan itu menuntut perlunya penghayatan baru dan pengembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu konsep keilmuan, instrumentasi, dan praksis pendidikan yang utuh. Penghayatan dan pengembangan dalam menumbuhkan *civic intelligence*, *civic participation*, dan *civic responsibility* sebagai warga negara Indonesia dan sebagai pendidik

profesional dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, dan menjadikan pendidikan kewarganegaraan sebagai sistem pengetahuan yang semakin kuat.

Upaya pengembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu konsep keilmuan, instrumentasi, dan praksis pendidikan yang utuh sejalan dengan kecenderungan (*trend*) pendidikan kewarganegaraan yang mulai dikembangkan bukan saja sebagai program kurikuler di sekolah, tetapi juga telah menjadi kajian ilmiah, dan gerakan sosial kultural kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan tentu saja membawa implikasi dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah (sebagai mata pelajaran). PKN di sekolah merupakan “mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkepribadian yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945” Tahun (Lampiran 2006 tentang Standar Isi). Sebab upaya mewujudkan warga negara Indonesia yang baik sebagaimana diharapkan dalam UUD 1945, tidak dapat dilepaskan dari konstelasi perkembangan zaman. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini berupaya menemukan data dan mengetahui terkait dengan studi komparasi pelajaran PKN dan

Pelajaran PMP terhadap nilai Kebinekaan.

## **METODE**

### **Pendekatan dan Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Creswell (1998) yang mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut.

*Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyses words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting.*

Pendapat Creswell di atas menyatakan bahwa Penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk memahami berdasarkan tradisi metodologi penelitian tertentu dengan cara menyelidiki masalah sosial atau manusia. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji secara *interpretative* terhadap data-data dari berbagai sumber tentang pelajaran PKN dengan Pelajaran PMP dalam menanamkan nilai kebinekaan pada siswa, menggambarannya secara menyeluruh, menganalisis setiap data yang muncul, melaporkan pandangan-pandangan para informan yang muncul sebagai data secara rinci, dan melakukannya dalam situasi alamiah.

### **Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu data *primer* dan data *sekunder*. Data primer berasal dari informan, yang meliputi: Kepala Sekolah, Wakasek Kurikulum, Guru dan Pengguna Alumni pada delapan sekolah yang ada di Kabupaten Sorong Papua Barat. Dalam hal ini peneliti ingin mendapatkan informasi terkait dengan kecenderungan guru terhadap pelajaran PMP karena keberhasilan dalam menanamkan nilai kebinekaan di bandingkan pelajaran PKN.

Untuk menentukan subyek penelitian ini, dilakukan dengan *snowball sampling*. Menurut Neuman (2000), teknik *Snowball* juga disebut teknik jaringan atau reputasi, adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memanfaatkan informasi responden yang sebelumnya telah peneliti temui. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen atau arsip, yang antara lain berupa dokumen-dokumen dan arsip yang ada kaitannya dengan langkah yang dilakukan dalam upaya pemeratan pendidikan untuk siswa SMP/MTs di Kabupaten Sorong Papua Barat.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam dilakukan pada Kepala Sekolah, Wakasek

Kurikulum, Guru dan Pengguna Alumni pada delapan sekolah yang ada di Kabupaten Sorong Papua Barat. dari wawancara mendalam ini adalah untuk mendapatkan data mengenai kecenderungan guru pada Pelajaran PMP di bandingan PKN dalam penanaman nilai kebinekaan pada siswa.

2. Observasi partisipan dilakukan dengan tujuan mengetahui secara langsung atau turut berpartisipasi dalam keseharian informan dalam penanaman nilai kebinekaan pada siswa. Metode ini digunakan untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara mendalam yang diberikan oleh informan yang mungkin belum menyeluruh atau bahkan melenceng terkait dengan kecendungan guru dalam pelajaran PMP.
3. Metode dokumentasi digunakan untuk mengkaji atas berbagai dokumen resmi baik yang bersifat internal maupun eksternal. Bersifat internal dalam artian pengkajian langsung atas dokumen, sedangkan yang bersifat eksternal berupa sumber-sumber yang mendukung pengkajian atas dokumen. Dokumen internal yang dimaksud adalah berbagai peraturan dan atau kebijakan tentang pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Sedangkan dokumen eksternal berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kecenderungan

guru dalam pelajaran PMP di bandingkan pelajaran PKn di sekolah.

### 3.2 Teknik Analisis Data

*Pertama*, teknik analisis deskriptif kualitatif, menurut Miles dan Habermas (dalam Sugiyono, 2011), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai data terasa jenuh. Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan mencari secara terus menerus mengenai penanaman nilai kebinekaan yang sudah dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber, secara sistematis dilakukan analisis data meliputi tahapan: (a) reduksi data (*data reduction*); (b) penyajian data atau *data display*; (c) penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Ketiga kegiatan atau tahapan tersebut dilakukan secara interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu proses.

*Kedua*, Analisis domain. Dalam analisis domain informasi yang diperoleh belum mendalam, masih dipermukaan namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2007:101). Domain atau faktor-faktor yang terkait dalam penelitian ini adalah *faktor internal* (faktor yang mendukung dan menghambat terkait kecenderungan guru pada Pelajaran PMP di bandingan PKn dalam penanaman nilai kebinekaan pada

siswa) dan *faktor eksternal* (faktor yang mendukung dan menghambat PKn dalam penanaman nilai kebinekaan pada siswa).

### 3.3 Uji Keabsahan Data

Dalam proses pengecekan dan keabsahan data digunakan teknik pemeriksaan keabsahan data (*Trianggulasi*). Trianggulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Sedangkan jenis trianggulasi yang digunakan diantaranya: (a) trianggulasi sumber data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber; (b) trianggulasi teknik, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda Moleong (2010:30), Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pemeriksaan sebagai berikut:

- 1 Melakukan trianggulasi (*cek-riccek*). Untuk keperluan pengecekan terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara membandingkan apa yang dikemukakan oleh Kepala Sekolah, Wakasek Kurikulum, dan Guru atau dari dokumen-dokumen penanaman nilai kebinekaan pada siswa dengan apa yang dikatakan secara pribadi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 2 Melakukan member cek terhadap temuan di lapangan. Setelah melakukan penelitian, dalam hal ini

peneliti meminta pendapat kepada subjek penelitian dan orang-orang yang masih berkaitan dengan subjek untuk menilai kebenaran data, tafsiran, serta kesimpulan penelitian.

- 3 Perpanjangan keikutsertaan. Perpanjangan keikutsertaan berarti lama keintensifan pengumpulan data tidak diterapkan secara kaku, melainkan secara luwes sehingga apabila diduga dengan menambah lama dan keintensifan pengumpulan data masih bias memunculkan informasi baru, maka penambahan dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, peneliti dapat mempelajari bagaimana menguji kebenaran dan mengurangi distorsi.

## PEMBAHASAN

### **Rasional Pendidikan Kewarganegaraan**

Dalam pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), secara imperatif digariskan nasional bahwa berfungsi mengembangkan “Pendidikan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis idealisme pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Secara khusus, seperti dapat dicermati pada Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU tentang Sisdiknas “Pendidikan kewarganegaraan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Dalam konteks itu pen merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa. Secara historis epistemologis dan pedagogis, pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler dimulai dengan diintroduksikannya mata pelajaran *Civics* dalam kurikulum SMA tahun 1962 yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Dept. P&K: 1962).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya muatan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan (Pasal 39), Kurikulum Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 1994 mengakomodasikan misi baru pendidikan tersebut dengan memperkenalkan mata pelajaran

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, Kurikulum PPKn 1994 mengorganisasikan materi pembelajarannya bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai P4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatkan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas atau *spiral of concept development* (Taba,1967). Pendekatan ini mengartikulasikan sila-sila Pancasila dengan jabaran nilainya untuk setiap jenjang pendidikan dan kelas serta catur wulan dalam setiap kelas.

Kondisi dan situasi yang pernah dialami Amerika Serikat. Sejak kelahirannya tahun 1880-an, beberapa istilah digunakan secara bertukar pakai, seperti istilah “*Civics, Civic/Citizenship Education, Social Studies/Social Science Education*” sampai dengan terbitnya dokumen akademis NCSS (1994) yaitu “*Curriculumards for Social Stand Studies: Expectations of Excellence*” Tetapi kini, krisis konseptual dan kurikuler di Amerika Serikat itu, telah berhasil diatasi. Setidaknya mereka kini telah mencapai suatu konsensus akademis dan programatik yang pada gilirannya akan memandu terjadinya proses kurikulum yang lebih koheren.

Dalam upaya mencari kesepakatan, yang kalau bisa dapat melahirkan “*curriculum seperti standards*” di Amerika Serikat, ada

beberapa pertanyaan yang perlu dicari bersama-sama jawabannya, antara lain: *Tujuan pendidikan nasional yang mana yang secara logis seyogyanya menjadi garapan utama bidang pendidikan sosial? Bagaimana paradigma pembelajaran bidang pendidikan kewarganegaraan di sekolah?*

Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, perlu diadakan pengkajian khusus terhadap perkembangan pemikiran mengenai pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1999 sebagai titik akhir abad ke 20. Hal itu dapat dilihat dari cita-cita, konsep, nilai, prinsip yang secara konseptual tersurat dan atau tersirat dalam berbagai dokumen resmi, yang memang merupakan pilar-pilar pendidikan nasional Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam buku “*Lim Pendidikan Indonesia*” (Djojonegoro: 1996 sejak tahun 1995 sampai sekarang. Sedangkan *citizenship education* menurut Cogan (1998). Penegasan mengenai tujuan dan misi tersebut secara konsisten terus dipertahankan dalam berbagai dokumen resmi yang berkenaan dengan pendidikan di Indonesia.

Keadaan itu ternyata terus berlanjut sampai berubahnya Kurikulum PMP 1984 menjadi Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tahun 1994, yang walaupun namanya mencakup

kajian pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan Undang-Undang No 2 tahun 1989, tetapi karakteristik kurikulumnya sangat kental dengan pendidikan moral Pancasila, yang didominasi oleh proses *value inculcation* dan *knowledge dissemination*

Hal tersebut dapat disimak dari profil kurikulum PPKn 1994, yang menunjukkan karakteristik sebagai berikut (Depdikbud, 1993).

*Pertama*, Di SD PPKn bertujuan untuk Menanamkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila. Sementara itu di SMP, PPKn bertujuan untuk Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila dalam rangka pembentukan sikap dan perilaku.

*Kedua*, Materi pembelajaran dikembangkan berdasarkan butir-butir konsep nilai yang tercakup dalam masing-masing sila Pancasila, kemudian diorganisasikan secara artikulatif antar catur wulan pada setiap kelas dan jenjang (SD,SMP,SMA). Pendekatan kurikulum spiral, yakni *spiral of concept development* ala Taba (1967) tampaknya diterapkan secara ketat untuk tercapainya prinsip *continuity, integration, and articulation* (Tyler, 1949).

*Ketiga*, Karena begitu ketatnya penerapan prinsip artikulasi dalam pengorganisasian materi pembelajaran, dan dengan merujuk kepada butir nilai.

Kurikulum PPKn 1994, nuansa paradigmatis *civic education*-nya belum terasa. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa PPKn 1994, secara paradigmatis sesungguhnya masih sama dengan PMP sebelumnya. Atau dengan kata lain, Pendidikan Pancasila masih tetap berperan sebagai *core* atau *concerto*-nya, dengan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu *accompaniment*-nya. Dari situ dapat dipahami, mengapa perilaku demokratis yang cerdas dan religius, yang menjadi karakteristik *civic education* dalam masyarakat madani, belum sepenuhnya berkembang dalam masyarakat-bangsa Indonesia.

Dari terhadap perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sampai dengan saat ini, dapat dikatakan bahwa baik dalam tataran konseptual maupun dalam tataran praksis terdapat kelemahan paradigmatis yang sangat mendasar. Yang paling menonjol adalah kelemahan dalam konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan, penekanan yang sangat berlebihan terhadap proses pendidikan moral yang behavioristik, ketakkonsistenan penjabaran dimensi tujuan pendidikan nasional kedalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan, dan keterisolasian proses pembelajaran nilai Pancasila dengan konteks disiplin keilmuan dan sosial-budaya.

**Kecenderungan Pelajaran PMP**



### **dalam penanaman nilai Kebinekaan**

Dapat dipastikan bahwa hampir tidak ada lagi negara di dunia ini yang dapat hidup tanpa berhubungan dengan bangsa-bangsa lainnya (Azis Wahab, 2006). Teori interdependensi semakin menunjukkan kebenarannya. Itu berarti bahwa warga negara yang disiapkan melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah harus dibekali dengan tema-tema selain ketergantungan, juga tentang perubahan budaya, kelangkaan dan konflik. Semua tema tersebut dalam pengajarannya harus senantiasa dilihat dalam konteks global dengan mengutamakan pada isu-isu dan masalah-masalah lokal.

Dalam kerangka di atas, kebutuhan untuk membekali warga negara dengan pemahaman global, menjadi tidak terelakan dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengembangkan warga negara global. Karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan dewasa perlu memperhatikan kecenderungan-kecenderungan global yang terjadi yang mau tidak mau mempengaruhi Pendidikan Kewarganegaraan.

Azis Wahab (2006:63-64) mengemukakan beberapa kecenderungan global yang berpengaruh dalam Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai berikut:

Gagalnya penerapan konsep pendidikan kewarganegaraan yang lalu, sebagai akibat dan penekanan pada

kebenaran yang bersifat monovision dan samasekali mengabaikan kemungkinan multivision atau jika itu dilakukan hanya Terjadinyabersifatperubahan system semupoliti; 2) yang lebih mengarah pada upaya reformasi di berbagai bidang kehidupan baik sosial dan budaya, politik itu sendiri, ekonomi dan hukum yang wajib termuat baik dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah maupun kurikulum pendidikan tinggi (Pasal 37). 3) Perubahan pada atribu kecenderungan global yang bersifat u global pendidikan kewarganegaraan untuk demokrasi.

Kecenderungan global di atas mempengaruhi pengembangan konsep-konsep dan paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan, termasuk untuk pengembangan warga negara yang memiliki perspektif global.

### **Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah**

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa secara historis, kurikulum PKn persekolahan mengalami fluktuasi terutama dalam penamaan dan konten materi. Pertama kali muncul dengan nama Kewarganegaraan (1957), *Civics* (1961), Pendidikan Kewargaan Negara (1968), Pendidikan Moral Pancasila (1975), Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (1994), Kewarganegaraan (Uji Coba Kurikulum

2004) dan terakhir dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan (2006).

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa materi kajian pendidikan kewarganegaraan wajib termuat, baik dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah maupun kurikulum pendidikan tinggi (Pasal 37). Adanya ketentuan tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam UU tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai mata pelajaran wajib di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi menunjukkan bahwa mata pelajaran ini menempati kedudukan yang strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada jenjang SMP/MTs mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Permendiknas No. 22 Tahun 2006).

Adapun tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan: (1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara, serta anti-korupsi, (2) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya (3) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (Permendiknas No. 22 Tahun 2006)

Sedangkan ruang lingkup materi Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan kurikulum tahun 2006 adalah: (1). Persatuan dan Kesatuan bangsa, (2). Norma, hukum dan peraturan, (3). Hak asasi manusia, (4). Kebutuhan warga Negara, Konstitusi Negara, (5). Kekuasaan dan Politik, (6). Pancasila, (7). Globalisasi. (Permendiknas No. 22 Tahun 2006) Tujuh ruang lingkup materi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2006 ini selanjutnya diperinci ke dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya mewujudkan warga negara Indonesia yang baik sebagaimana diharapkan dalam UUD 1945, tidak dapat dilepaskan dari konstelasi perkembangan zaman. Berdasarkan hal tersebut, penelitian menemukan data dan mengetahui terkait dengan studi kompirasi pelajaran PKN dan Pelajaran PMP terhadap nilai Kebinekaan. Pelajaran pendidikan

pancasila dan kewarganegaraan menurunnya moralitas remaja, semakin tingginya individualisme anak, serta lebih mementingkan kelompok pergaulan yang kontra dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat di bandingkan dengan Pelajaran PMP.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azis Wahab, A. (1996). "Politik Pendidikan Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia menuju Wargane Pidato pengukuhan jabatan guru besar tetap dalam Ilmu Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Moral Pancasila, Kewarganegaraan dan Hukum FPIPS IKIP Bandung. 18 Oktober 1996  
----- (2006).  
Pengembangan Konsep dan Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Baru Indonesia bagi Terbinanya Warganegara Multidimensional Indonesia. Dalam Budimansyah, Dasim dan Syaifullah (ed). Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan (Menyambut 70 tahun Prof.Drs.H.A. Kosasih Djahiri). Bandung: Lab. PKn FPIPS UPI.
- Cogan, John J and Ray Derricot. (1998). *Citizenship for the 21<sup>st</sup> Century: An International Perspective of Education*. London: Kogan Page.
- Creswell, John W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. London: Sage Publications.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Kurikulum 2004 : Kompetensi Standar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Depdiknas Republik Indonesia.
- Djojonegoro, W. (1996). *Limapuluh Tahun Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Neuman, W. Lawrence (2000), *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*, 4<sup>th</sup> edition, Allyn & Bacon, Boston.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Sugiyono. (2007). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Afabeta
- Taba, H., Durkin MC., Fraenkel, JR. and McNaughton, AH. (1971). *A Teacher's Handbook of Elementary Social Studies: An Inductive Approach*. Reading: Addison Wesley.

- Tyler, RW. (1975). *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Winataputra, U.S. 2006. *Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Ditnaga Dirjen Dikti.